

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 35 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang keseluruhan berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dari periode tahun 2015-2017.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengambil semua populasi dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2017, sehingga jumlah pengamatan sebesar 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 3 tahun = 105 sampel pengamatan.

1.2 Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, standar deviasi (Ghozali, 2011). *Mean* digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dari data bersangkutan. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari suatu data bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah Belanja Modal, sedangkan variabel independen adalah Pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi

khusus (DAK). Hasil pengujian statistik deskriptif ditunjukkan dengan menggunakan tabel *descriptive statistics* yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif (Sebelum Outlier)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	105	2.5	23.5	5.522	1.8780
PAD	105	74339697	1791886379	336957459.57	222782166.847
DAU	105	400176755	1398539653	938655593.64	244445296.225
DAK	105	3750100	483813446	213571422.59	122695931.272
BM	105	51980727	1349349490	377362739.10	202406853.912
Valid N (listwise)	105				

Berdasarkan tabel 4.1 diatas hasil analisis statistik deskriptif sebelum outlier dengan jumlah sampel 105 :

1. Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi yang paling rendah sebesar 2,5% yaitu pada Kabupaten Kudus pada tahun 2016 sedangkan data yang paling tinggi adalah 23,5% yaitu Kabupaten Blora pada tahun 2016 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 5,522 dengan standar deviasi 1,8780.
2. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah data yang paling rendah sebesar 74.339.697 yaitu Kabupaten Blora tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.791.886.379 yaitu Kota Semarang pada tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 336.957.459,57 dengan standar deviasi 222.782.166,84.
3. Berdasarkan data Dana Alokasi Umum yang paling rendah sebesar 400.176.755 yaitu pada Kota Salatiga tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.398.539.653 yaitu pada Kabupaten Banyumas tahun 2016,

memiliki nilai rata-rata sebesar 938.655.593,64 dengan standar deviasi 244.445.296,22.

4. Berdasarkan data Dana Alokasi Khusus yang paling rendah sebesar 3.750.100 yang terdapat di Kota Surakarta pada tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 483.813.446 pada Kabupaten Cilacap tahun 2016, memiliki nilai rata-rata sebesar 213.571.422,59 dengan standar deviasi 122.695.931,27
5. Berdasarkan data Belanja Modal yang paling rendah sebesar 51.980.727 pada Kabupaten Rembang tahun 2016, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.349.349.490 yaitu pada Kota Semarang tahun 2015, memiliki nilai rata-rata sebesar 377.362.739,09 dengan standar deviasi 202.406.853,91.

1.3 Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Berdasarkan analisis hasil penelitian berikut adalah hasil uji normalitas sebelum outlier nilai skewness dan kurtosis dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas (Sebelum Outlier)

Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	105	1.155	.236	3.041	.467
Valid N (listwise)	105				

Dari nilai skewness dan kurtosis pada tabel 4.3 dapat dihitung nilai Zskewness dan Zkurtosis sebagai berikut :

$$Zskewness = \frac{Skewness}{\sqrt{6/N}} = \frac{1.155}{\sqrt{6/105}} = 4,8317$$

$$Zkurtosis = \frac{Kurtosis}{24/N} = \frac{3.041}{\sqrt{24/105}} = 6,3607$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai skewness dan kurtosis lebih besar dari Ztabel yaitu $\pm 1,96$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi belum menunjukkan titik residual yang berdistribusi normal.

Hal ini dapat diatasi dengan menghilangkan outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari obsevasi-obsevasi lainnya dan muncul dalam nilai ekstrim baik dalam sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011). Setelah dilakukan metode tersebut jumlah sampel yang digunakan menjadi 99 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Uji Normalitas yang ke dua dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas (Sesudah Outlier)

Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	99	.073	.243	-.149	.481
Valid N (listwise)	99				

Dari nilai skewness dan kurtosis pada tabel 4.3 dapat dihitung nilai $Z_{skewness}$ dan $Z_{kurtosis}$ sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{Skewness}{\sqrt{6/N}} = \frac{0.073}{\sqrt{6/99}} = 0,2965$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{Kurtosis}{24/N} = \frac{-0.149}{\sqrt{24/99}} = -0,3026$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai skewness dan kurtosis lebih kecil dari Z_{tabel} yaitu $\pm 1,96$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah menunjukkan titik residual yang berdistribusi normal.

1.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah pada data harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2011).

4.4.1 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen, Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya multikolonieritas ini adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Kriteria pengambilan keputusan

dengan nilai tolerance dan VIF adalah Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 berarti terjadi multikolonieritas dan Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 berarti tidak terjadi multikolonieritas. hasil uji multikolinieritas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PE	.995	1.005
	PAD	.833	1.200
	DAU	.585	1.709
	DAK	.625	1.599

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan hasil perhitungan nilai *tolerance* yang dimiliki variabel independen kurang dari 10% (= 0,10) yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

4.4.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hasil uji Autokorelasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.858 ^a	.737	.725	86961376.857	2.034

a. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 4.5 diatas merupakan hasil uji Durbin-Watson, dapat dilihat nilai D-W sebesar 2,034 selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5% dalam jumlah sampel dalam penelitian ini selama 3 tahun adalah 105 tetapi setelah pengeluaran data outlier menjadi 99 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan jumlah variabel independen 4 (k=4) maka dari tabel *Durbin Watson* didapatkan : $n = 99$, $k = 4$, $DW = 2,034$, $dL = 1,5897$, $dU = 1,7575$ dan $4 - dU = 4 - 1,7575 = 2,2425$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai *Durbin Watson* dari model regresi lebih besar dari dU dan kurang dari 4- dU ($1,7575 < 2,034 < 2,2425$), Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi gejala

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi 5% jika dibawah 5% maka terdapat heteroskedastistas sedangkan diatas 5% maka tidak terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil uji heterokedastisitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.167E7	1.487E7		1.458	.148
	PE	-2.324E6	1.610E6	-.140	-1.444	.152
	PAD	-.006	.016	-.042	-.396	.693
	DAU	.027	.016	.207	1.637	.105
	DAK	.046	.032	.174	1.421	.159

a. Dependent Variable: ABSRES

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji glejser diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus nilainya diatas nilai alpha sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk penelitian.

1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9467360.822	42623758.602		-.222	.825
	PE	4799168.939	4614516.631	.055	1.040	.301
	PAD	.516	.045	.670	11.551	.000
	DAU	.123	.047	.180	2.604	.011
	DAK	.258	.092	.188	2.802	.006

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan hasil analisis, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$BM = -9467360.822 + 4799168.939 PE + 0,516 PAD + 0,123 DAU + 0,258 DAK$$

Model regresi tersebut bermakna bahwa konstanta sebesar -9467360.822 dapat diartikan bahwa Y (Belanja Modal) akan bernilai -9467360.822 jika Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK masing-masing bernilai 0 sedangkan:

1. Koefisien regresi variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar 4.799.168,939 artinya apabila Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan Belanja Modal meningkat sebesar 4.799.168,939
2. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah 0,516 artinya apabila PAD mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan Belanja Modal meningkat sebesar 51,6%.

3. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,123 artinya apabila DAU mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan Belanja Modal meningkat sebesar 12,3%.
4. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,258 artinya apabila DAK mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan Belanja Modal meningkat sebesar 25,8%.

4.6 Pengujian Model Penelitian

4.6.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen dan apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat diprediksi apakah seluruh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji statistik F pada penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.988E18	14	4.971E17	65.735	.000 ^a
	Residual	7.109E17	94	7.562E15		
	Total	2.699E18	98			

a. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar $65.735 > F$ tabel sebesar 2,70 dan nilai signifikan sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

4.6.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi determinasi (*adjusted R-square*). Hasil uji koefisien determinasi model penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.858 ^a	.737	.725	86961376.857

a. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Terlihat dalam tabel 4.9 besarnya nilai adjusted R^2 sebesar 0,725 yang berarti 72,5% variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya $100\% - 72,5\% = 27,5\%$ di jelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Maka layak dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.6.3 Uji statistik T (Uji Hipotesis)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian statistik t pada model ini menggunakan tingkat derajat kepercayaan sebesar 5% dengan jumlah data yang diuji sebesar 99, maka nilai dari t tabel pada penelitian ini sebesar 1.98552. Hasil uji statistik dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesi (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9467360.822	42623758.602		-.222	.825
PE	4799168.939	4614516.631	.055	1.040	.301
PAD	.516	.045	.670	11.551	.000
DAU	.123	.047	.180	2.604	.011
DAK	.258	.092	.188	2.802	.006

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki t hitung sebesar 1,040 yang nilainya dibawah t tabel sebesar 1.98552 dan signifikan sebesar 0,301 yang nilainya diatas 0,05 hal ini dapat diartikan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan “H₁ = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal” **ditolak**.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 11.551 yang nilainya diatas 1.98552 dan signifikan sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05 hal ini dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan “ $H_2 =$ Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ” **diterima**.
3. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki t hitung sebesar 2.604 yang nilainya diatas 1.98525 dan signifikan sebesar 0,011 yang nilainya dibawah 0,05 hal ini dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan “ $H_3 =$ Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal ” **diterima**.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki t hitung sebesar 2.802 yang nilainya diatas 1.98525 dan signifikan sebesar 0,006 yang nilainya dibawah 0,05 hal ini dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan “ $H_4 =$ Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ” **diterima**.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Desentralisasi fiskal memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Teori *Stewardship* menggambarkan pemerintah sebagai *steward* harus bertanggungjawab kepada masyarakat dengan memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat dalam pengalokasian anggaran belanja modal guna untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi tidak dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana sehingga perbedaan kemampuan setiap daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki menyebabkan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013), Sari (2017), Kuncorowati (2017), Mundiroh (2019) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.7.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan lokal sendiri, khususnya melalui pendapatan asli daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang perlu untuk terus ditingkatkan. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PADnya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* merupakan penatalayanan dimana pemerintah daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat agar mampu bertindak tanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat memberikan telah menjalankan kewajibannya memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan lain-lain. Pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah menerima amanah menyajikan informasi bagi pemerintah pusat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal.

Pendapatan asli daerah dengan belanja modal terjadi karena hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Hasil peneeliatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), Arwati dan Hadiati (2013), Sari, dkk (2017), Kuncorowati (2017), Nofrizal (2017), Puspitasari dan Robiyanto (2017), Aditya & Maryono (2018), Mundiroh (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

4.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari dana APBN yang digunakan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Bantuan anggaran tersebut dengan besarnya DAU yang diterima pemerintah daerah akan digunakan pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah sebagai *steward* harus bertanggung jawab sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan prinsipal. Konsep ini didasarkan atas kepercayaan publik kepada pemerintah yang mana pemerintah merupakan peranan penting dalam daerah mengelola anggaran daerah sehingga pemerintah harus bertindak sebagai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat yaitu peayanan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan infrastruktur sarana dan prasarana dan memaksimalkan

pembangunan daerah dengan Dana Alokasi Umum melalui alokasi belanja modal berdasarkan teori stewardship maka, pemerintah harus menggunakan Dana Alokasi Umum secara maksimal dan tepat untuk pelayanan publik.

Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini daerah yang memiliki sumber penerimaan daerah yang kecil maka masih cenderung bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dalam mendanai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh penerimaan Dana Alokasi Umum. Sehingga daerah dengan pengalokasian DAU yang tinggi, maka pengalokasian Belanja Modal daerah tersebut juga ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), Setiawan (2015), Miftahul abid, dkk (2018), Mundiroh (2019) yang memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4.7.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahnya. Urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33 Tahun 2004). Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai program khusus di daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dengan maksud untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dana alokasi khusus sehingga pemerintah memanfaatkan dana alokasi khusus secara maksimal dan tepat untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus. Dalam tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan mendanai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dengan maksud untuk mendorong percepatan pembangunan daerah daerah melalui alokasi belanja modal.

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), Wandira (2013), Kuncorowati (2017), Miftahul Abid, dkk (2018) memperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus positif signifikan terhadap belanja modal.